

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kinerja birokrasi di Indonesia menjadi salah satu *issue* penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya penerapan sistem pengelolaan tradisional yang terkesan birokratis, kaku dan hirarkis. Kinerja birokrasi publik di Indonesia terkesan lemah. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja keuangan sektor publik menjadi suatu tantangan tersendiri untuk para pelaku birokrasi untuk memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dimulai dengan kemandirian, kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

Menurut Oktariani, Raharjo dan Andini (2016) tuntutan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan desentralisasi dan mereformasi diri dari pemerintah yang korupsi menjadi pemerintah bersih dan transparan ini didasarkan dengan adanya prinsip-prinsip *good governance*. Sehingga kebutuhan akan adanya pengawasan terhadap peningkatan kinerja organisasi, pemberian opini serta rekomendasi untuk melakukan koreksi atas permasalahan pencapaian kinerja dapat memberikan kegunaan untuk penyelenggara kinerja yang baik.

Salah satu untuk terciptanya *Good Governance* yaitu dengan adanya perubahan signifikan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penerapan akuntansi akrual di Indonesia, wajib dilaksanakan oleh seluruh entitas pelaporan sektor publik, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah dengan mengacu pada SAP. Sebagai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) tentu memiliki tanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diberikan untuk direalisasikan. Pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan dan akuntabel tersebut terlihat dari ditetapkannya PP 71 Tahun 2010.

Didalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lambat Tahun Anggaran 2015. Untuk Provinsi Riau penerapan akuntansi akrual dilaksanakan mulai tahun 2015 (Riau.go.id). Dampak penerapan akuntansi berbasis akrual ini menyebabkan adanya perubahan terhadap opini yang akan diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan daerahnya dapat dilihat dari hasil opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian BPK atas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pernyataan profesional pemeriksa (auditor) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian Standar Akuntansi

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Interen (Mahmudi, 2011:315). Oleh sebab itu, kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah tetapi juga dari efektivitas pengawasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten INHU tahun 2015, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan item yang dikecualikan dalam pemberian opini yaitu nilai investasi permanen penyertaan modal dan nilai aset lain-lain untuk LKPD tahun 2015 (pekanbaru.go.id). Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Kabupaten Indragiri Hulu lima tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun Pemeriksaan	Opini Yang Diberikan BPK RI	Keterangan
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Opini ini naik atas pemberian opini tahun sebelumnya
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Opini ini sama dengan tahun sebelumnya. BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan
2013	Wajar Dengan	Opini ini sama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pengecualian (WDP)	tahun sebelumnya. BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Opini yang sama masih diberikan BPK RI dengan item kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Opini yang sama yang diberikan BPK RI dengan telah diterapkannya sistem basis akrual. Pengecualian opini terhadap laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah untuk Kabupaten Indragiri Hulu yaitu nilai investasi permanen penyertaan modal dan nilai aset lain-lain

Sumber: Pekanbaru.bpk.go.id

Berdasarkan tabel diatas berturut-turut meraih WDP baik sebelum diberlakukannya basis akrual maupun sesudah diterapkannya basis akrual yang menjadikan permasalahan muncul atas ketidaktransparan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten INHU. Ketidaktransparan tersebut dapat dilihat dari Aset milik Pemkab Inhu, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, senilai Rp207 miliar hilang. Hal ini diketahui setelah dilakukan sensus aset milik Pemkab Inhu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hilangnya aset Pemkab Inhu senilai Rp207 miliar yang menjadi penghambat diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(WTP) dari BPK RI, dibenarkan Kabag Pengelolaan Aset Setda Inhu, Iliyanto, saat dikonfirmasi Jumat (29/4) (riaumandiri.co).

Dengan adanya hal tersebut, BPK mengingatkan mengenai berbagai kelemahan dalam pengungkapan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati dan Walikota untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (pekanbaru.bpk.go.id).

Dengan adanya beberapa temuan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan menjadi sesuatu yang penting untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten INHU.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, Sularso dan Putri (2016) tentang Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kota Tegal menjelaskan bahwa Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah, pengendalian intern dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Dari latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti kembali sejauh mana pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DAN EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apakah efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana signifikansi pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang implementasi Standar Akuntansi berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan khususnya pada instansi pemerintah.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

3. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat dalam dunia akademis mengenai “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu” dan sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II

:Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas hasil- hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

BAB III

: Metode Penelitian

Menguraikan deskripsi variabel-variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV

: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasannya.

BAB V

: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.